

KONSEPSI DAN TOLOK UKUR KETAHANAN REGIONAL DALAM MENGANTISIPASI AKSELERASI DINAMIKA PARADIGMA GLOBAL

Oleh : DR. Ir. Dicky Rezaldy Munaf, MS. MSCE

Terindkasikan pengertian bahwa perkembangan interaksi kehidupan manusia pada saat ini akan didominasi oleh dua hal yang kontradiktif yaitu penyatuan kepentingan (*unifying effect*) dan tribalisasi (*kesukuan yang bukan dalam arti antropologis tradisional*). Hal ini dapat terlihat dengan menguatnya regionalisasi di dunia pada saat ini utamanya di wilayah Amerika Utara, Asia-Pasifik dan Eropa. Dalam upaya penyeimbangan kemampuan bersaing dan bersinergi antar ketiga kekuatan regional tersebut maka arah pada pembentukan daya saing perlu dicermati setiap saat dan mengingat regionalisasi tersebut melibatkan himpunan beberapa negara yang masing-masing memiliki kepentingan nasionalnya, maka upaya sinergi tersebut haruslah bersifat penyalarsan unsuryang sama dan bukan akumulasi dari kepentingan nasional masing-masing negara anggota. Dalam konteks pengertian ini, kajian Ketahanan Regional dilakukan dengan mengacu pada prinsip di atas dan difokuskan pada Kawasan ASEAN yang mana Indonesia terlibat langsung dan sangat berpengaruh. Penelusuran dilakukan dalam konteks Ketahanan Regional adalah meliputi: mencermati perkembangan tiga regionalisasi utama di dunia saat ini dan memperkirakan arah yang akan dituju, mengidentifikasi parameter dominan dalam pencapaian tujuan dan berupaya mengaitkan parameter tersebut, ekstrapolasi nilai universal global terhadap konsep Ketahanan nasional sehingga terjadi pengayaan konsep Ketahanan Nasional untuk dapat dipakai sebagai Konsep Ketahanan Regional, menuangkan konsepsi tersebut dalam bentuk Tolok Ukur Ketahanan Regional.

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin telah menciptakan lingkungan internasional baru yang ditandai oleh perubahan yang cepat dan ketidakpastian. Perubahan yang terpenting adalah terbentuknya modal non-konvensional

yang mempunyai dampak sangat besar bagi budaya manusia secara keseluruhan, khususnya cara manusia dan bangsa-bangsa memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus meningkat. Dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang baru telah muncul secara menonjol yaitu ilmu penge-

tahuan, informasi dan inovasi. Manifestasinya dapat dilihat pada ter us meningkatnya kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dan kaji ulang dari berbagai informasi dan berkembangnya suatu masyarakat informasi terdiri dari para manusia yang hidup dan

berkarya di bidang pendayagunaan informasi yaitu yang mengandalkan pengetahuan dan daya nalarnya. Ketidakpastian mewarnai lingkungan internasional, justru karena perubahan cepat yang terjadi di segala bidang kehidupan dalam sistem internasional.

Sistem internasional merupakan jaring antar negara yang dewasa ini sudah berjumlah 184, masing-masing negara mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan-hubungan politik, ekonomi dan hubungan fungsional lainnya.

Siapa yang lebih mempengaruhi siapa, ditentukan oleh struktur posisi relatif dari kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) norma-norma perangal (*behavior*) serta parti-

sipasi proaktif yang membentuk interaksi fungsional negara-negara itu. Ciri-ciri struktural dan fungsional dari interaksi itu berubah dari waktu ke waktu dengan berubahnya kemampuan relatif dan motivasi dari para pelaku interaksi, dalam hal ini anggota sistem internasional itu. Selain interaksi antar pemerintah negara dan antara negara dengan lembaga internasional, sistem internasional juga mencakup hubungan melewati wilayah nasional antar organisasi swastal, antar kelompok dan perorangan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan ekonomi, ilmiah, agama, pendidikan, kemanusiaan, hak asasi, kebudayaan dan lain-lain, antar mereka maupun antara mereka dan pemerintah negara lain dan

lembaga-lembaga internasional. Daya mampu dan kekuatan negara-negara tidak pernah konstan, ini disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak merata di antara masyarakat-masyarakat serta terobosan modal non-konvensional dan organisasional yang memberi keuntungan-keuntungan lebih besar bagi suatu masyarakat dibanding masyarakat lainnya.

Berbagai interaksi dan perkembangan ini mempengaruhi keadaan dan perkembangan dalam negeri setiap negara. Kenyataan ini

Kenyataan ini menunjukkan, bahwa negara merdeka (independent) itu saling tergantung (interdependent) secara internasional, atau dengan kata lain, berintegrasi. Semakin besar saling ketergantungan, atau integrasi itu, semakin berkurang kebebasan negara individual menentukan sendiri politik dalam negeri maupun luar negerinya.

menunjukkan, bahwa negara merdeka (*independent*) itu saling tergantung (*interdependent*) secara internasional, atau dengan kata lain berintegrasi. Semakin besar saling ketergantungan, atau integrasi itu, semakin berkurang kebebasan negara individual menentukan sendiri politik dalam negeri maupun luar negerinya. Hubungan dan interaksi semakin tunduk kepada berbagai pengaturan. Dalam sistem internasional dengan tingkat integrasi tinggi, interaksi antar anggotanya lebih stabil dan lebih *predictable*. Sebaiknya, semakin sedikit interaksi dan hubungan dengan kata lain dalam sistem internasional yang longgar, semakin besar pula kebebasan dan kemandirian negara individual

untuk menentukan sendiri keinginan dan perkembangannya. Tetapi dalam sistem yang longgar itu keadaan menjadi cair (*fluid*) sulit diperkirakan dan menjadi kurang stabil.

Mencermati kecenderungan interaksi kehidupan manusia di seluruh dunia dalam satu dasa warsa terakhir ini maka dapat diamati adanya fenomena **Global Paradoks** dalam interaksi kehidupan tersebut, yaitu ditandai dengan adanya upaya penyatuan tujuan hidup (*unifying effect*) sedang di

lain pihak timbul kesadaran akan kebutuhan pengakuan hak pribadi atau hak kelompok. Khusus untuk aspek yang kedua ini ada kecenderungan tere-

rosinya pandangan pentingnya kolektifitas oleh tribalisme yang dicirikan dengan penonjolan kepentingan masing-masing kelompok atau unit sosial.

Paradigma kehidupan manusia tersebut di atas akan mengakibatkan makin pentingnya interaksi antar unit sosial atau bangsa yang mungkin memiliki kepentingan berbeda, sehingga jalinan interaksi ini menjadi dominan dalam pencapaian ketenteraman kehidupan manusia. Jalinan ini akan rentan terhadap gangguan perbedaan kepentingannya dan efek kembangnya (*butterfly effect*) terhadap unit sosial lain. Fenomena ini didefinisikan sebagai aspek **Kaotik** (*chaotics*) kehidupan manusia, artinya potensi dalam kehi-



Presiden Abdurrahman Wahid bersama Presiden Amerika Serikat: Bill Clinton di Gedung Putih. (Repro: Tempo)

dupan manusia yang mampu merusak namun dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia tersebut jika sifat pretoriannya dapat dimanfaatkan. Aspek ini terkait dengan perubahan sosial yang diakibatkan oleh peningkatan peradaban manusia yang dijawantahkan dalam bentuk Tingkat Partisipasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka paradigma interaksi kehidupan manusia secara lengkap dapat dikatakan dicirikan dengan 3 parameter utama yang meliputi: Statis (sumber daya); Dinamis (aspek yang melandasi interaksi kehidupan) dan Kaotik (aspek yang mampu bersifat pretorian dalam kehidupan manusia). Ketiga parameter ini akan merupakan pemacu atau akselerator bagi makin eratnya interaksi kehidupan manusia yang mungkin keceratan tersebut dapat ditingkatkan dengan partisipasi Kaotik ("Chaos") bagi terbentuknya

landasan baru bagi tatanan interaksi kehidupan manusia tersebut.

Interaksi kehidupan manusia ini dalam skala yang lebih luas direpresentasikan dengan interaksi antar bangsa atau negara yang mungkin dalam interaksinya dapat menghasilkan manfaat atau masalah. Hasil interaksi antar bangsa ini di masa mendatang akan menjadi banyak variasi sebagai dampak global paradoks, sehingga jika banyak negara / bangsa yang terlibat dalam interaksi ini maka diusulkan agar hasil interaksi ini dapat ditelaah dengan Model Jaringan Berlapis, artinya interaksi pada lapis pertama adalah pada tingkat bilateral dan pada lapis kedua ditinjau dampaknya dalam konteks regional. Model ini tentu juga harus meningkatkan kualitas ketahanan masing-masing negara/bangsa yang terlibat dan ketahanan regional di mana negara-negara tersebut berada.

Mengawali pembahasan ketahanan suatu negara maupun ketahanan regional di mana negara tersebut berada, maka perlu dimulai dari pengertian bahwa setiap bangsa yang telah menegara memiliki tujuan nasional sebagai pengejawantahan cita-cita nasionalnya yang mungkin dilandasi oleh falsafah dan ideologi bangsa tersebut.

Tujuan nasional tersebut direpresentasikan dalam bentuk pembangunan nasional yang pasti memerlukan interaksi dengan negara lain selain mensinergikan interaksi potensi internal dalam bangsa tersebut. Namun demikian proses pencapaian tujuan nasional tersebut selalu menghadapi Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG) dari sisi internal maupun eksternal, sehingga untuk menanggulangi bahkan memanfaatkan TAHG tersebut, setiap bangsa harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatannya sendiri, disebut Ketahanan Nasional, maupun ketahanan bersama negara lain dalam konteks wilayah tertentu, disebut Ketahanan Regional.

Bertolak dari uraian di atas, maka model Konsepsi Ketahanan Regional dengan kerangka pikir untuk mampu menciptakan keuletan dan ketangguhan dengan melibat-

kan parameter interaksi kehidupan manusia yang proaktif akan diuraikan, demikian pula instrumen yang diperlukan untuk menilai konsep tersebut yang dituangkan dalam Tolok Ukur akan dijelaskan dalam pengkajian ini.

Tujuan kajian ini adalah untuk menyumbangkan pemikiran tentang hal yang strategis dari konsepsi Ketahanan Regional yang berorientasi memperkuat solidaritas politik dan kerjasama di segala bidang demi tercapainya tujuan bersama dalam menghadapi akselerasi. Dinamika Paradigma **G l o b a l** Konsepsi ini akan

dilengkapi dengan Tolok Ukur Ketahanan Regional yang melibatkan parameter kaotik yang bersifat antisipatif proaktif.

Hipotesis Kajian adalah *"Kecenderungan KOMPETISI interaksi antar bangsa di dunia akan mendominasi pencapaian Ketahanan Nasional melalui Ketahanan Regional sehingga perlu pengembangan DAYA SAING atas dasar penyelesaian unsuryang sama dalam suatu Regional"*.

REGIONALISME GLOBAL DAN ASIA TENGGARA

Fenomena kuas interaksi kehidupan manusia tampak menonjol yaitu maraknya pengelompokan regional. Kelompok-kelompok yang mengambil peran dalam basis ini baik politik maupun ekonomi sudah berjalan sejak lama,

namun selama itu tertutupi oleh persaingan kekuatan *bipolar*. Hilangnya ketegangan dunia memunculkan kelompok ini ke depan panggung internasional. Selain itu, kecenderungan regionalisasi juga terpacu dengan sulitnya perundingan perdagangan multilateral. Kekhawatiran kegagalan forum multilateral ini dan hilangnya persaingan politik global, mendorong meningkatnya pengelompokan regional tersebut. Peningkatan regiona-

Pada dasarnya pengelompokan regional dapat dilihat sebagai proses atau upaya yang pada akhirnya menuju ke penyatuan (integrasi) ekonomi dan mungkin politik. Teori klasik menyebutkan terdapat tujuh tahapan menuju integrasi ekonomi (dan politik)

lisme tersebut turut dipengaruhi oleh tanggapan terhadap perkembangan kelompok-kelompok satu sama lain. Dengan demikian perubahan pola dari bipolarisme ke multipolarisme turut memengaruhi kelompok-kelompok regional ini, bersama-sama negara secara individual ke dalam berbagai sentra kekuatan meski dengan kualitas yang berbeda.

Pada dasarnya pengelompokan regional dapat dilihat sebagai proses atau upaya yang pada akhirnya menuju ke penyatuan (integrasi) ekonomi dan mungkin politik. Teori klasik menyebutkan terdapat tujuh tahapan menuju integrasi ekonomi (dan politik) sebagai berikut:

Pertama adalah Free Trade Area (FTA) di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun nontarif dihapus di kawasan da-

gang, namun masing-masing anggota kelompok masih mempertahankan aturan tarifnya dengan negara ketiga di luar kawasan.

Kedua adalah Custom Union (CU) yang selain memberikan kemudahan seperti dalam FTA, mempunyai kebijakan tarif bersama terhadap negara ketiga. **Ketiga** adalah Common Market (CM) yang selain mengatur perdagangan ba-

rang juga mengatur faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang bebas bergerak dalam kawasan itu.

Keempat adalah Economic Union (EU) yang merupakan perluasan CM dengan aspek koordinasi (dan harmonisasi) kebijakan ekonomi, pengaturan pasar, kebijakan moneter, hingga kebijakan redistribusi pendapatan. Sehingga dikatakan EU memiliki kebijakan perdagangan bersama.

Kelima adalah Monetary Union (MU) yang menentukan nilai tukar mata uang negara anggota dan konvertibilitasnya, atau kesepakatan akan satu mata uang yang berlaku di seluruh negara anggota. Pada tahap MU ini sudah terdapat tingkat integrasi yang tinggi di bidang makro ekonomi dan kebijakan anggaran.

Keenam adalah Economic and Monetary Union (EMU) yang menggabungkan isi EU dan MU yang bergerak bersamaan.

Ketujuh adalah *Full Economic In tegration* (FEU) yang merupakan penyatuan total semua sendi perekonomian negara anggota. Keadaan dalam FEU sudah seperti pengaturan dalam sebuah negara.

Dalam kerangka tersebut EU dan ASEAN merupakan contoh dari kelompok regional yang meningkatkan intensitas integrasi dan kerja samanya seiring dengan surut serta hilangnya ketegangan dunia meski dengan tahapan yang berbedakan ASEAN masih baru mulai dengan FTA, Uni Eropa telah jauh lebih maju memasuki tahap EMU di akhir abad 20. Peningkatan atau penguatan regionalisme dalam gambar baru dunia terlihat dalam *Traktat Maastricht* dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang merupakan wujud langsung dari kebutuhan tersebut. North America Free Trade Area (NAFTA) dan APEC di pihak lain dapat dipandang sebagai alternatif baru terhadap kekhawatiran gagal sistem multilateralisme, di samping merupakan tanggapan terhadap perkembangan eksklusivisme integrasi Eropa serta alat AS untuk menekan Uni Eropa dalam perundingan GATT yang penting fenomena ini berlangsung berevolusi dipercepat setelah Perang Dingin berlalu.

Dalam masa peralihan setelah Perang Dingin diperlukan kejelian masing-masing negara untuk memanfaatkan berbagai perkembangan dan pergeseran politik maupun ekonomi yang muncul seiring

dalam proses pembentukan tatanan internasional baru.

Dari proses integrasi Eropa dapat dilihat tiga ciri pokok pendekatan yang dilakukan yakni **legalitas, institusionalitas, dan supranasionalitas**. Legalitas mengacu pada amat kuatnya kandungan hukum dalam proses integrasi. Semua kesepakatan dituangkan ke dalam traktat yang mengikat. Selain itu, kesepakatan ditulis secara rinci tanpa memberi peluang interpretasi ganda.

Dengan latar belakang demikian, UE tumbuh menjadi sosok yang ada saat ini, sebuah kekuatan ekonomi nyata namun yang masih mencoba tampil kompak dalam bidang politik. Di bidang ekonomi, UE adalah subyek hukum internasional sebagaimana layaknya negara menjadi anggota PBB menentukan kebijakan tunggal atau melakukan perundingan. Sedangkan di bidang politik, UE tak ubahnya sekumpulan negara yang mencoba bekerja sama untuk menjalin kebijakan yang sama. Sebuah pekerjaan rumah UE lain yang berat selain masalah pendalaman kualitas integritas menuju EMU (*deeping*) adalah masalah pelebaran cakupan integrasi dengan memperluas keanggotaannya (*widening*). Keberhasilan integrasi ekonomi UE telah membuat negara-negara sekitar lain tertarik untuk bergabung.

ASEAN di pihak lain menunjukkan proses dan sifat yang berbeda walau dengan hasil yang secara relatif sama. Yang harus diingat pertama kali

adalah proses yang selama ini berjalan di ASEAN bukan merupakan upaya integrasi tetapi kerja sama. Didirikan pada 1967 di bawah bayang-bayang Perang Vietnam dan meningkatnya kebangkitan gerakan komunisme di kawasan itu, motivasi meronjol dalam pembentukan ASEAN adalah faktor politik dan keamanan. Meskipun *Deklarasi Bangkok* yang mendasari pembentukan ASEAN menyebutkan kerja sama ekonomi seperti disebutkan oleh ekonomi dan sosial, adalah masalah-masalah politik yang menjadi agenda utama ASEAN dalam dua dekade pertama. Setelah kesamaan persepsi berhasil dibangun dan dasar-dasar filosofis berhasil ditegakan kemudian ASEAN mengisi kerangka tersebut dengan kerja sama ekonomi yang lebih substansial ketika pada KTT-IV di Singapura 1992, menyepakati untuk membentuk AFTA pada 2003.

Dalam konteks ini dapat dilihat prioritas pertama kerja sama ASEAN adalah berdialog saling membiasakan diri satu sama lain, saling mengerti dan menghormati dan berkawan. Lambannya kerja sama ASEAN di tahun-tahun pertama banyak disebabkan oleh terserapnya sebagian besar perhatian ke usaha untuk membangun rasa percaya bahwa saling membutuhkan dan dapat bekerja sama untuk membangun kawasan dan menyepakati segala sesuatu melalui musyawarah untuk mencapai konsensus. Deklarasi Bangkok dapat dilihat sebagai komitmen politik negara-negara



Pertemuan dua kepala pemerintahan ASEAN antara Indonesia dan Thailand guna menyusun gambaran baru hubungan sesama negara ASEAN (Repro. Merdeka)

anggota untuk bersatu dan bekerja sama tanpa mengurangi kedaulatan nasional masing-masing negara dalam mengupayakan stabilitas politik kawasan yang dapat menunjang pembangunan nasional. *Declaration of ZONE ASEAN (1971)*, *Declaration of ASEAN Concord Treaty of Amity and Cooperation (1976)* adalah tonggak-tonggak penting dalam tahap ini. Meskipun demikian, tidak berarti ASEAN mengabaikan kerja sama ekonomi seperti disebutkan oleh Deklarasi Bangkok. Kerja sama ekonomi ASEAN dapat dibagi ke dalam empat tahap: 1967-1976, 1976-1987, 1987-1992 dan 1992-sekarang.

Keberhasilan ekonomi ASEAN bersama negara-negara Asia Timur lain, meskipun masih lebih banyak disebabkan oleh upaya individual daripada hasil kerja sama dalam kerangka ASEAN, telah meningkatkan kepercayaan diri ASEAN untuk meningkatkan perannya dalam turut me-

nyusun gambar baru hubungan internasional setelah Perang Dingin. Keberhasilan ASEAN "mengikat" negara-negara besar untuk berdialog dalam pertemuan tahunan di forum *Post Ministerial Conference (PMC)* dan kebutuhan untuk mengadakan dialog dan konsultasi mengenai masalah-masalah politik dan keamanan yang lebih spesifik di negara-negara di kawasan telah mendorong ASEAN untuk meluncurkan wahana baru yaitu *ASEAN Regional Forum (ARF)* pada 1994. Dari perjalanan ASEAN tersebut dapat dilihat tiga karakteristik kerja sama ASEAN. Pertama adalah Informalitas-konsensus dan Fleksibilitas pragmatisme. Kecuali *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* 1976 dan *Treaty of Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone (TSANWFZ)* 1995 ASEAN tidak mendasarkan kerja samanya atas perjanjian internasional formal. Dasar pembentukan ASEAN hanya berupa sebuah

deklarasi. Bertolak belakang dengan UE dokumen-dokumen ASEAN pada umumnya singkat, hanya menyebutkan prinsip-prinsip pokok. Hingga kini, ciri-ciri informal dan luwes maupun pragmatis dapat menghasilkan berbagai keputusan yang semuanya diambil secara konsensus. Selama ini ASEAN telah berhasil membangun gaya negosiasi informal yang

menghindari perundingan keras, konfrontasi, atau memermalukan mitra. Bagi ASEAN, memelihara harmoni, keselarasan dan keseimbangan, lebih penting daripada memperoleh hasil yang cepat dan konkret.

Gaya informal ini mencerminkan budaya politik Asia yang memberikan banyak peran pada para pemimpin.

Kekhasan lain, jika jauh sebelumnya ASEAN membiarkan masalah-masalah sensitif dan kontroversial 'menggantung jika tak ada kesepakatan kini masalah-masalah tersebut dapat dibicarakan di forum lain pertemuan jalur dua (*track two process*), seperti lembaga-lembaga pengkajian, seperti ISIS sehingga tidak perlu menyulitkan para pemimpin yang dapat mengganggu hubungan antar pemerintah. Jika dari pembicaraan informal itu tercapai kesamaan pandang perundingan dapat segera dialihkan ke pertemuan-

pertemuan formal antar pemerintah.

Ciri kedua adalah **minimalitas**. Ini terlihat dari relatif sedikitnya pertemuan formal. Hingga 30 tahun usianya, ASEAN baru mengadakan lima kali KTT formal dan dua kali KTT informal serta pertemuan tahunan tingkat menteri. Penampilan yang lebih banyak bersifat informal dan kuatnya hubungan pribadi (*personalized*) itu menunjukkan kualitas institusionalisasi yang secara mencolok berbeda dengan Uni Eropa.

Ciri ketiga adalah **ketahanan regional**. Konsep Indonesia yang diterima sebagai konsep dasar ASEAN ini mensyaratkan adanya ketahanan kolektif dari ketahanan nasional masing-masing negara anggota untuk memperoleh ketahanan regional. Konsep ini banyak dilandasi oleh pemikiran bahwa negara dunia ketiga seharusnya bekerja sama mengerahkan kekuatan untuk mengurangi ketergantungan politik-ekonomi mereka dari negara G-7. Semangat ini terlihat nyata ketika negara-negara berkembang mengampanyekan Tata Ekonomi Dunia Baru melalui kerja sama Selatan-Selatan, untuk menghapuskan ketergantungan dari negara-negara maju dengan memobilisasi sumber daya dan kemampuan sendiri. Namun terlalu besar dan beragamnya kepesertaan kelompok membuat penyaluran aspirasi tersebut banyak disandarkan pada ketahanan kolektif kawasan.

Tersirat bahwa ASEAN percaya bahwa dengan

ketahanan nasional yang kuat akan tercipta ketahanan regional yang kokoh dan pada gilirannya menampilkan ASEAN yang solid. Berdasarkan konsep ini, kerja sama tidak harus berujung ke integrasi, namun lebih mengarah ke alat untuk membangun kekuatan dan kedaulatan nasional. **Jadi, nasionalisme tetap merupakan faktor pendorong yang kuat.** Meski diakui bahwa keberhasilan ekonomi anggota ASEAN sampai saat ini masih banyak disebabkan oleh keberhasilan individual daripada hasil kerja sama kawasan, namun kondisi kerja sama ASEAN yang demikian merupakan dasar yang kokoh dalam meningkatkan penampilan ASEAN seperti terbukti selama ini.

ASEAN bahkan Asia, menentang pengaitan perdagangan atau bantuan pembangunan dengan isu-isu seperti demokrasi, hak-hak azasi manusia atau lingkungan hidup dan menganggap sikap tersebut sebagai pemaksaan penerapan nilai-nilai Barat di dunia Timur. Penolakan ini semakin keras sejalan dengan menguatnya kepercayaan diri Asia yang berasal dari keberhasilan pembangunan ekonomi mereka. Keberhasilan tersebut memunculkan identitas kawasan yang dilandaskan pada nilai budaya Timur sebagai alternatif yang setaraf dengan atau bahkan lebih dari nilai-nilai Barat, yang oleh Asia justru dipandang sedang runtuh. Perdebatan tentang nilai ini terlihat menonjol hingga paruh pertama 1990-an. **Secara**

ideologis, universalisme Barat memperoleh tentangan dari relativisme Asia.

Berbeda dengan konsep individualisme, budaya Asia lebih menekankan pada hak ulayat, kesatuan dan persatuan, keharmonisan sosial, musyawarah dan mufakat atau atau penghormatan terhadap pemimpin. Dengan prinsip kemasyarakatan ini, perorangan tidak saja memiliki hak, namun juga kewajiban dan tanggung jawab, yang sering harus diutamakan jika keselarasan sosial terganggu. Karena itu, demokrasi liberal dianggap membahayakan stabilitas politik dan menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Dalam posisi demikian, Asia berkeyakinan bahwa hak-hak azasi manusia harus dipahami dalam konteks budaya, sejarah dan ekonomi suatu negara. Selama kemiskinan masih membelit, hak sosial dan ekonomi memperoleh prioritas utama di atas hak-hak politik.

LINGKUNGAN STRATEGIS DALAM INTERAKSI KEHIDUPAN MANUSIA

Proses globalisasi itu juga didorong oleh lahirnya satu wadah global, persatuan bangsa-bangsa (PBB) pada penghujung PD 11, yang beranggotakan semua negara-bangsa itu, baik negara-negara "tua" (berusia lebih kurang 200 tahun), maupun negara-negara yang baru merdeka setelah PD I (kira-kira 30-an) dan terutama setelah PD 11 (sekitar 70 persen dari

jumlah negara dewasa ini), serta negara-negara yang mungkin masih akan lahir lagi. Terdapat disparitas yang sangat besar dan beragam antara negara-negara itu, praktis meliputi semua unsur pembentuk kemampuan nasional. Seperti homogenitas etnik, ukuran besar negara, tersedianya sumber daya alam, agama, ideologi, ekonomi, sosial budaya militer, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, tingkat kemajuan dan sebagainya.

Disparitas besar beragam itulah yang menimbulkan dependensi internasional (dalam rangka interdependensi internasional). Tidak ada atau sangat kurangnya berbagai sumber daya itu menimbulkan kelemahan-kelemahan pada banyak negara berkembang, apalagi negara-negara termiskin (*the least Developed Countries LDCs*). Untuk dapat berlanjut hidup mereka membutuhkan sumber-sumber dari luar untuk bantuan ekonomi, bantuan kemanusiaan, bantuan dalam bencana-bencana alam seperti musim kering, banjir, gempa, bantuan militer untuk membentuk dan memelihara kemampuan militer yang paling sederhana sekalipun (yang tak jarang digunakan untuk kepentingan para penguasa), dan pasar bagi ekspor komoditas primer jika ada.

Di samping negara-negara adidaya, besar, sedang, kecil dan lemah itu, terjadi pula pertumbuhan yang proliferaif dari berbagai sektor (unit) non-negara yang juga dapat sangat mempengaruhi agenda inter-

nasional. Diantaranya yang terpenting ialah:

a. **Aktor Teritorial Non-negara (ATN)** seperti PLO yang duduk dalam PBB dengan status peninjau dan berbagai gerakan "pembebasan nasional" lainnya, seperti berbagai faksi di Somalia, Afganistan, Basque di Spanyol; Kurdi di Irak - Turki - Iran - Armenia, dan sebagainya. Berbagai ATN ini mempengaruhi lingkungan politik internasional dan regional.

b. **Aktor Non-teritorial Transnasional (ANT)** seperti perusahaan-perusahaan multi nasional (MNC). Jika MNC terutama bergerak di bidang ekonomi nasional dan internasional (tetapi ada kalanya juga politik nasional negara-negara lemah), ciri-ciri ANT ialah:

1) Mempunyai aktivitas terorganisir yang berlangsung bersamaan dalam beberapa negara sekaligus.

2) Mempunyai sasaran-sasaran yang tidak berhubungan dengan kepentingan-kepentingan negara individual.

3) Mempunyai unsur-unsur komponen yang secara esensial bersifat non politik.

c. **Organisasi-organisasi antar Pemerintah (inter-governmental organization, atau IGO)**, seperti PBB dengan segala agen spesialis. IGO sering mempunyai pengaruh besar dalam dimensi internasional dan mempengaruhi pula

agenda domestik negara-negara anggotanya, tetapi kadang-kadang kebijakannya dapat pula bertentangan dengan kebijakan satu atau lebih anggotanya. Dengan semakin padatnya jaringan hubungan-hubungan internasional karena pertumbuhan transaksi-transaksi sosial, komersial dan komunikasi, keperluan untuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah meningkat pula.

d. **Lembaga-lembaga Sosial Masyarakat** (lebih dengan sebutan NGO). Melalui lembaga-lembaga NGO ini rakyat seluruh dunia dapat saling bertemu dan bertukar pikiran dalam berbagai bidang sosial budaya kemanusiaan dan lingkungan hidup. NGO merupakan bentuk yang paling efektif dalam meletakkan landasan-landasan dan menyelenggarakan hubungan *an people to people*.

Semua lembaga tersebut di atas ikut dalam pentas internasional. Dapat dibayangkan betapa kompleksnya sistem internasional yang global itu tidak mungkin semua negara di dunia dapat ikut berkiprah dalam semua aspek dan dimensi sistem internasional itu. Meskipun semua unsur itu berperan, namun negara-bangsa tetap merupakan pemain yang terpenting oleh karena itu:

a. Hanya negaralah yang mampu menggalang kesetiaan dari rakyat yang menghuni suatu teritor tertentu.

b. Hanya negaralah yang

mampu mengerahkan segala sumber daya untuk mengatasi ancaman terbesar (perang).

- c. Hanya negara pulalah yang memiliki konsern yang meliputi keseluruhan masalah yang menyangkut kesejahteraan dan keamanan semua rakyat.
- d. Hanya negara yang memiliki kedaulatan.

Dengan hadirnya strata baru tersebut, setidaknya kini dapat diidentifikasi lima tingkat pengambilan keputusan dalam hubungan internasional, yakni aturan global dan multi lateral

seperti WTO dan konvensi internasional lain, dialog antar kelompok regional seperti APEC, atau ASEM atau ASEAN - NAFTA/ASEAN-Mercosur, kelompok subregional seperti

BIMP-EAGA, Sijori, dan hubungan bilateral antara negara.

Dari kelima tingkatan itu, tingkatan yang didasarkan pada hubungan antar kelompok, menunjukkan peran yang semakin penting dalam hubungan internasional. Sementara itu, mengingat semakin banyaknya pelaku politik internasional dengan heterogenitas dan keragaman kepentingan terasa semakin sulit untuk mencapai kemufakatan ditingkat global/multilateral. Sebagai contoh adalah lamanya perundingan dalam kerangka GATT membuktikan hal itu. Keadaan ini belum ditambah dengan keharusan ratifikasi yang juga

memakan waktu lama. Sedangkan arti penting peran interaksi bilateralpun, di sisi lain, turut menurun, seperti ditunjukkan oleh banyaknya keputusan ditentukan oleh interaksi tingkat di atasnya, seperti persoalan lingkungan hidup, perdagangan, atau investasi.

Hubungan antar kelompok regional itu dengan demikian mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi proses institusionalisasi hubungan internasional. Desakan-desakan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan ke-

Hubungan antar kelompok regional itu dengan demikian mempunyai kemampuan mempengaruhi proses institusionalisasi hubungan internasional. Desakan-desakan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk mengkompromikan pemecahan dalam dan antara kelompok-kelompok regional itu akan menciptakan satutingkat interaksi tersendiri di luar struktur dialog yang telah ada.

butuhan untuk mengkompromikan pemecahan dalam dan antara kelompok-kelompok regional itu akan menciptakan satu tingkat interaksi tersendiri di luar struktur dialog yang telah ada.

Dilandasi oleh paradigma baru kualitas interaksi manusia dalam berbangsa dan bernegara baik dalam konteks global maupun regional dapat dilihat bahwa terdapat suatu parameter kehidupan yang akan mendominasi kualitas hidup manusia yang dapat diakomodir oleh aspek statis dan dinamis yang selama ini ada, yaitu kemampuanantisipasi partisipatif yang didukung oleh jaringan berlapis. Adapun alasan tidak ter-

akomodirnya parameter ini pada aspek statis dan dinamis adalah dilandasi oleh kedua aspek ini yang tidak mampu memberi koridor yang dapat digunakan untukantisipasi proaktif guna meningkatkan peradabdn manusia. di lain pihak, parameter kaotik adalah suatu parameter yang mengandalkan kecerdasan manusia dalam upayanya memiliki daya salng untuk berperan dalam dunia global.

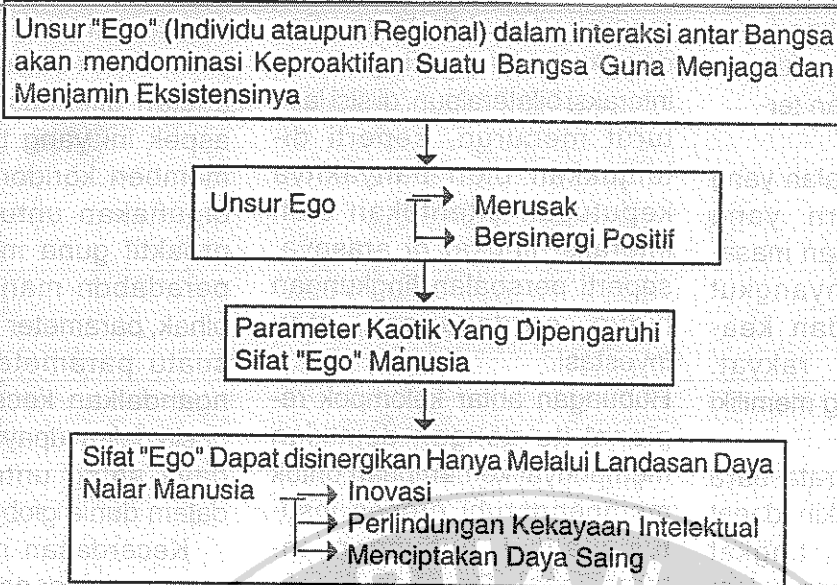
Kecerdasan manusia merupakan faktor pendorong bagi suatu bangsa yang dapat berfikiran ganda, yaitu sebagai

modal persaingan **s e k a l i g u s** dapat juga menjadi **s a r a n a** perusak tata kehidupan jika tidak diimbangi moral yang mantap. Unsur utama dari parameter kaotik

adalah:

- Kemampuan inovasi
- Kemempuan perlindungan kekayaan intelektual
- Kemampuan menciptakan daya saing

Ketiga unsur dari parameter kaotik tersebut tirul dari sikap suatu bana sebagai implementaii'dari keinginannya untuk dat diakui di dunia ini dengar,memberikan sentuhan konst'uktif bagi tingkat peradaban manusia yang strateginya perlu dilakukan dengan berjenjang tergantung pada tingkat aplikasi dari unsur parameter kaotik ini. Proses identifikasi ketiga unsur utama di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Identifikasi Unsur Parameter Kaotik

KONSEPSI KETAHANAN REGIONAL

Berlandas kecenderungan paradigma interaksi kehidupan berbangsa yang dipaparkan pada Bab terdahulu, semakin disadari bahwa kepentingan dan kebutuhan suatu negara tidak lagi mungkin dipenuhi mandiri dan terlepas dari masyarakat dunia sehingga ketahanan suatu bangsa mutlak diperlukan. Dalam konteks ASEAN, Indonesia merintis upaya untuk membina suatu Ketahanan Regional ASEAN mengingat kawasan ini selalu menjadi obyek kekuatan luar dan tidak pernah menjadi motivator untuk lingkungannya sendiri apalagi untuk lingkungan luar.

Konsep Ketahanan Regional ASEAN ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan konsep dasar bahwa "Common denominator" kepentingan nasional masing-masing anggota harus dapat **diserasikan kemudian disinergi-**

kan menjadi suatu ketangguhan dan keuletan kawasan. Ketahanan Regional **bukanlah jumlah total** dari Ketahanan Nasional masing-masing anggota.

Bertitik tolak dari konsep dasar di atas, maka Ketahanan Regional hanya dapat dicapai dengan membangun manusia sebagai pelaku interaksi. Bab ini akan menjelaskan konsepsi dasar dan tolok ukur Ketahanan Regional ASEAN berlandas Visi "ASEAN 2020: Partnership in dynamic Development" yang telah diacu oleh seluruh anggota ASEAN dalam menetapkan strategi Pembangunan Nasionalnya. Artinya Visi ini adalah penyelaras awal dari segenap proses pembangunan para anggota ASEAN. Mengacu pada titik sentral pengertian bahwa pembangunan manusia adalah unsur utama dari proses sinergi Ketahanan Regional dan digabungkan dengan adanya gejala pentingnya parameter kaotik dalam menentukan kualitas

interaksi antar bangsa, maka konsepsi Ketahanan Regional yang akan dikembangkan akan mengoptimalkan pandangan perlunya meninjau aspek statis (Trigatra) dan aspek dinamis (Pancagatra) dengan suatu koridor aspek kaotik sehingga diperoleh mekanisme sinergis kepentingan nasional anggota ASEAN tanpa melibatkan unsur-unsur yang memang tidak dapat disinergikan sesuai kepentingan masing-masing anggota, karena dengan melibatkan ini justru mungkin timbul konflik.

Terkait dengan penjelasan di atas, maka Konsepsi Ketahanan Regional ASEAN adalah konsepsi pengembangan kekuatan Regional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dan selaras dalam aspek **kehidupan berpotensi** yang utuh, menyeluruh dan terpadu berlandas pada kepentingan yang sama, searah dan bersifat proaktif untuk memperoleh daya saing. Jadi kata kunci dalam ketahanan regional adalah **Serasi, Proaktif dan Institusional**.

Satu hal yang penting juga adalah bahwa Ketahanan Regional ini perlu dievaluasi secara periodik sehingga dapat dinilai kecenderungan perubahannya dengan transformasi dari waktu ke waktu dinyatakan dengan pemetaan. Namun demikian mengingat sampai saat ini belum ada indikasi nilai Ketahanan Regional. Maka untuk menentukan *Benchmark* Nilai Ketahanan Regional dilakukan transformasi nilai Tannas ke Tanreg dengan

formulasi :

$$\left(\frac{\text{Nilai Statis} + \text{Nilai Dinamis}}{100} \times \text{Nilai Tannas} \right) + \text{Nilai Kaotik}$$

Kemudian regresi nonlinier pada Nilai Tanreg transformasi dengan derajat kepercayaan seperti ditunjukkan pada gambar 2. antara 99 + 100% diaplikasikan

Nilai Transformasi Tannas ke

$$\text{Tanreg} \left(\frac{51,5}{100} \times Z \right) + 48,5$$

dimana nilai 51,5 dan 48,5 diperoleh dari analisis Tolok Ukur Ketahanan Regional yang diusulkan. Sedangkan nilai A 1 dan A2 adalah merepre-

$$t_2 - t_1 = t_3 - t_2 \text{ (Periodik)}$$

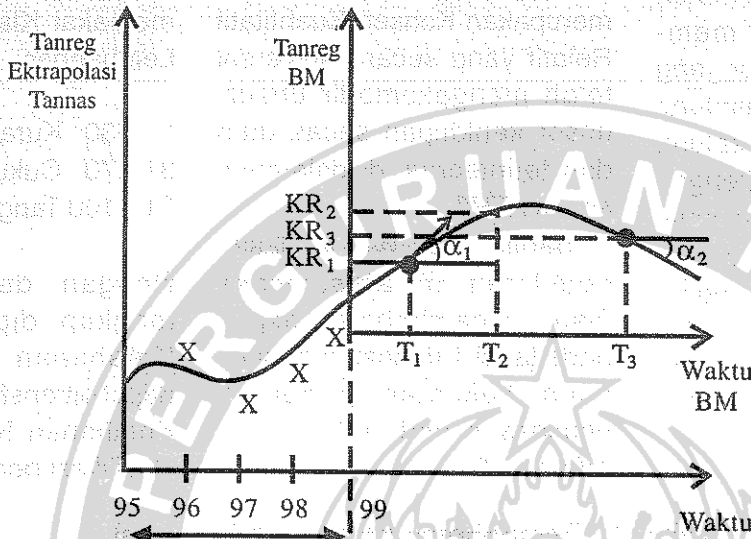
$$\alpha_1 = \text{arc tg} \frac{KR_2 - KR_1}{t_2 - t_1}$$

$\alpha > 0 \rightarrow$ baik

$\alpha > 0 \rightarrow$ perlu kaji ulang kondisi Regional

$i = 1, 2, 3, \dots$

sentasikan kemampuan anti-sipasi dari satu kawasan pada suatu rentang waktu. Jika nilai A adalah negatif maka dapat dirancang kegiatan yang mampu menjadi pendorong agar nilai A pada waktu berikut adalah positif. Demikian pula jika nilai A positif maka laju antisipasi adalah yang diinginkan dengan nilai proporsional. Kembali ke pengertian dasar Ketahanan Regional ASEAN yang merupakan sinergi dari unsur-unsur yang serasi di antara negara-negara anggota yang tidak mempertimbangkan unsur yang merupakan ke-khasan dari tiap negara anggota maka Ketahanan Regional ASEAN khususnya diusulkan mempunyai unsur keterkaitan sebagai berikut:

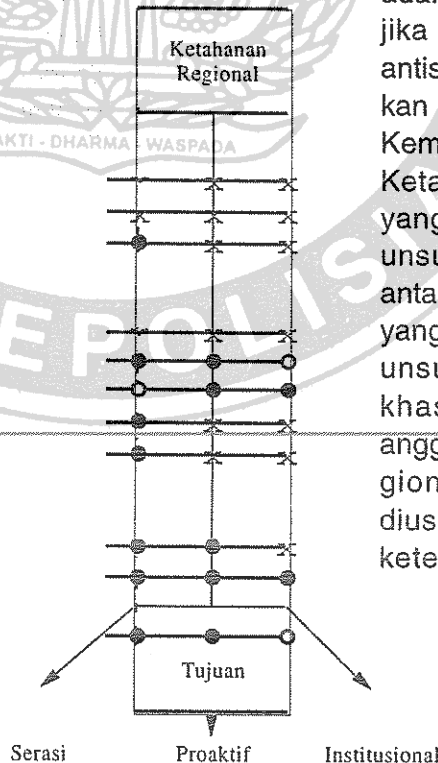


Gambar 2. Pemetaan Ketahanan Regional

- Statis**
 - Geografi
 - Demografi
 - SKA
- Dinamis**
 - Ideologi
 - Politik
 - Ekonomi
 - Sosial Budaya
 - Hankam
- Kaotik**
 - Inovasi
 - Perlindungan kekayaan intelektual
 - Daya saing

Catatan

- : Sangat dominan
- : Dominan
- X : Tidak terkait



Gambar 3. Pohon Keterkaitan Unsur Ketahanan Regional

TOLOK UKUR KETAHANAN REGIONAL

Rumusan tolok ukur Ketahanan Regional yang diusulkan adalah yang didasari pada unsur-unsur yang tersebut pada pohon keterkaitan unsur yang disebut pada pasal sebelumnya. Pohon keterkaitan tersebut mempunyai keterkaitan unsur yang timbal balik, saling bergantung dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan serasi. Dengan demikian Ketahanan Regional adalah pengertian holistik dimana kelemahan satu negara akan mengakibatkan kelemahan unsur lainnya dan mempengaruhi totalitas konfigurasi dan kondisi Ketahanan Regional secara total dan

nasional Indonesia bernuansa internasional. Perlu dijelaskan bahwa pengkajian telah juga dilakukan dengan melihat Konsep-konsep Tolok Ukur Ketahanan Nasional lainnya seperti model Sri Jatno, RM Soenardi, Tony Rumbayan dan Vektor Analisis, namun konsep Ketahanan Nasional Lemhanas merupakan Konsep Kuantitatif Relatif yang secara universal telah mengakomodir unsur-unsur kehidupan secara utuh dan terintegrasi di dalamnya aspek ATHG.

Bertitik tolak dari landasan pemikiran di atas, maka disusun pembobotan aspek pada tabel 1 dengan mengacu pada kekuatan pengaruh dominasi seperti tertera pada referensi 28

- Nilai Tanreg tanpa Kaotik = $Y = X - 48.5$
- Transformasi Nilai Tanreg ke nilai Tannas Lemhannas

$$Z = \frac{100}{551,5} \times Y$$

Sedangkan Klasifikasi Kondisi Ketahanan Regional adalah memakai Klasifikasi Nasional Lemhannas:

- 1 - 30 Kurang Tangguh
- 31 - 70 Cukup tangguh
- 71 - 100 Tangguh

Dengan demikian secara lengkap diperoleh konsep Ketahanan Regional yang dapat ditransformasikan ke nilai Ketahanan Nasional, beserta klasifikasi penilaian kondisinya

Tabel 1. Pembobotan Ketahanan Regional

No.	Aspek	Komponen	Bobot
1	Statis	SKA	$1 / 3 \times 5 = 2$
2	Dinamis	Politik	$2.5 / 3 \times 10 = 8.5$
		Ekonomi	$2.5 / 3 \times 15 = 12.5$
		Sosbud	$2.5 / 3 \times 23 = 20$
		Hankam	$2.5 / 3 \times 10 = 8.5$
3	Kaotik	Inovasi	17.5
		Perlindungan Kekayaan Intelektual	18.5
		Daya Saing	15.5
		Total	100

Ketahanan Nasional anggota secara parsial.

Model tolok ukur Ketahanan Regional yang dipakai adalah model tolok ukur Ketahanan Nasional Lemhanas dengan tujuan agar Ketahanan Regional yang diusulkan dapat dikorelasikan terhadap nilai Ketahanan Nasional Indonesia sekaligus sebagai bahan penilaian terhadap kondisi

Klasifikasi Tolok Ukur yang dipakai adalah Klasifikasi Lemhanas dengan alasan agar kajian Ketahanan Regional dapat diekstrapolarisasikan terhadap Ketahanan Nasional.

Adapun proses transformasi nilai Ketahanan Regional ke Ketahanan Nasional dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Nilai Tanreg = X

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berlandas pada uraian dan pembahasan kajian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yang dikaitkan dengan tujuan penulisan Taskap ini mengenai kollsepsi dan Tolok Ukur

Ketahanan Regional, yaitu:

1. Interaksi kehidupan manusia saat ini maupun di masa datang dicirikan oleh adanya Global Paradoks yang memuat unsur "unifying effect" dan tribalisme adalah merupakall potensi konflik antar bangsa yang perlu diantisipasi dan dicegah melalui pendekatan humaniti yang mengandalkan penghargaan maksimal terhadap kemampuan intelektual manusia dan naluri manusia dalam menciptakan daya saing.
2. Kolektifitas Daya Saing individu dalam suatu bangsa perlu diselaraskan guna menghasilkan parameter Kaotik yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Meskipun penyelarasan parameter kaotik tergantung pada nilai historis bangsa tetapi sesungguhnya naluri manusia adalah sama yaitu menuju peningkatan kualitas kehidupan manusia.
3. Upaya negara Barat dalam menerapkan sistem nilai baru dalam kehidupan manusia mendapatkan tentangan dari Asia yang memiliki karakteristik dan histori kultur yang berbeda disebut tatanan nilai relativitas Asia. Berlandas kenyataan ini dan orientasi regionalisme global, maka pola interaksi yang dikembangkan harus dapat mengakomodir kontradiksi ini. Hal ini dapat dilakukan melalui penyatuan visi kemampuan pikir manusia

yang merupakan harkat mendalam manusia dan peningkatan daya saing untuk memperoleh kesetaraan dengan budaya lain.

4. Menguatnya regionalisme di dunia ini yang ditandai dengan adanya regionalisasi Amerika Utara, Asia-Pasifik dan Uni Eropa memberikan peluang bagi anggota ASEAN untuk meningkatkan perannya di masa depan. Kekuatan nasionalisme bangsa Asia Tenggara, akibat perjalanan historisnya merupakan sarana awal bagi penyelarasan potensiyang dimiliki anggota ASEAN tanpa melupakan kepentingannya masing-masing. Kekuatan ini diarahkan bagi pencapaian maksimal parameter kaotik melalui eksplorasi kemampuan pikir spesifik untuk menciptakan daya saing yang diimbangi rasa solidaritas.
5. Berlandas kesepakatan dasar ASEAN yang meliputi pengertian bahwa ASEAN bukanlah merupakan badan supra nasional dan tidak diarahkan menjadi Pakta Militer, maka konsepsi Ketahanan Regional ASEAN dikembangkan dengan prinsip mengidentifikasi dan menyelaraskan aspek yang dapat disinergikan. Kajian Taskap ini mengusulkan bahwa dalam Ketahanan Regional ASEAN perlu diadakan prioritas telaah dengan pembobotan aspek statis dan dinamis: aspek Kaotik = 51,5: 48,5. Argumentasinya adalah bahwa Konsepsi ini

dikembangkan dari konsep Ketahanan Nasional Lemhannas dengan mengeliminir parameter-parameter yang berpotensi konflik jika, diselaraskan. Adapun pemberian bobot yang besar terhadap aspek kaotik adalah ditujukan agar ASEAN lebih proaktif dalam pencapaian daya saing.

6. Tolak Ukur beserta Klasifikasi Ketahanan Regional yang diusulkan adalah modifikasi dari Tolak Ukur. Ketahanan Nasional yang dibuat Lemhannas dengan eliminasi parameter sumber konflik. Namun demikian korelasi linier tetap dapat dilakukan agar hasil kajian Ketahanan Regional dengan menggunakan konsep yang diusulkan tetap dapat mengukur kondisi Ketahanan Nasional Indonesia. Juga diusulkan bahwa pengukuran Ketahanan Regional harus dapat dilakukan secara periodik agar kecenderungannya dapat digunakan untuk analisis antisipasi proaktif dan kemandirian ASEAN di masa datang melalui kajian Parameter Kaotik.

SARAN

UNTUK ASEAN

Agar kerjasama dan solidaritas ASEAN dapat ditingkatkan dalam menghadapi dinamika paradigma global, disarankan 5 langkah kerjasama yang harus dilaksanakan secara simultan dengan 2 tujuan, ke dalam: memantapkan

solidaritas dan keluar: kemampuan berdaya saing, agar tercapai suatu Ketahanan Regional yang tangguh dan stabil. Langkah yang disarankan adalah:

- Peningkatan ketahanan nasional masing-masing anggota dengan mendayagunakan revolusi teknologi agar sesama anggota dapat saling mengingatkan jika ada gejala gangguan pada salah satu anggota.
- Pembinaan aspirasi kawasan secara terintegrasi melalui infrastruktur politik untuk diarahkan pada tercapainya pemahaman Daya Saing Regional.
- Merintis pembentukan mekanisme jaring berlapis yang m e n g a n d a l k a n pemberdayaan unsur-unsur masyarakat (tidak hanya diplomasi) sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat diselesaikan pada tepat saat dan tepat tempat berlandas pada antisipasi dini.
- Penghimpunan sinergis kapasitas dan kapabilitas intelektual kawasan guna peningkatan berkesinambungan Pembangunan Daya Saing Regional.
- Aktif melihat potensi pembentukan kerjasama dengan unit-unit non negara yang ada di dunia saat ini maupun dengan kawasan Amerika Latin yang secara historis sosiologis maupun potensi SKA memiliki kapabilitas yang mirip dengan negara-negara ASEAN.

UNTUK INDONESIA

Berkaitan dengan indikasi yang diperoleh dari pengkajian ini, berikut ini diuraikan saran dalam gatra yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam Ketahanan Regional.

- Bidang Politik: S e j a l a n dengan proses Otonomi Daerah yang dituangkan dalam UU No. 22/99 perlu kiranya diperkuat dengan Keinginan Politik yang memperkuat daerah dengan memberi kebebasan daerah dalam berinteraksi dengan dunia internasional untuk dapat memacu daya saingnya.
- Bidang Ekonomi: Meningkatkan diversitas potensi ekonomi dan kegiatan intelegen ekonomi berbasis Sumber Kekayaan Alam dan Potensi Intelektual, sehingga strategis Pembangunan Ekonomi Nasional dapat lebih proaktif dan antisipatif terhadap perkembangan dinamika dunia.
- Bidang Sosial Budaya: Kontrol perbedaan Vertikal dan Horisontal dalam evolusi mosaik melalui Sistem Pendidikan dengan keutamaan peningkatan kualitas Toleransi & Etika berkehidupan yang diajarkan secara eksplisit atau implisit pada kurikulum tiap strata pendidikan .
- Bidang Pertahanan & Keamanan: Dalam sektor Pertahanan hendaknya dimensi pengertiannya diperluas sebagai upaya proaktif pencegahan dini dari aspek kehidupan yang terimbas dari menguatnya

geoekonomi

UNTUK LEMHANNAS

Agar konsep yang dikembangkan ini dapat terimplemen tasikan dan untuk meningkatkan peran Lemhannas agar lebih proaktif sebagai lembaga yang mampu menatap ke depan dengan usulan konsep nya yang operasional, maka disarankan hal berikut:

- Mengusulkan instrumen Ketahanan Regional untuk dipakai oleh mitra anggota ASEAN melalui para perwakilan RI di Luar Negeri
- Mengusulkan agar Ketahanan Regional secara periodik dengan waktu 6 bulan agar dapat diakomodir perkembangan regional pada setiap setengah tahun anggaran berjalan, sehingga proses pencegahan maupun antisipasi dini dapat dilakukan
- Menjadikan masukan Ketahanan Nasional sebagai pengukur Ketahanan Nasional dan memberi rekomendasi hasil evaluasi ke eksekutif Pemerintah melalui jaringan alumninya, utamanya dalam hal kecenderungan. Nilai Tannas dan Tanreg berikut rekomendasi solusinya. Adapaun rekomendasi ini dapat diolah melalui kelompok kerja terkait di Lemhannas
- Lemhannas kiranya dapat menjadikan Topik Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional sebagai Pola Ilmiah pokok Lemhannas dalam ikut serta secara proaktif untuk mengukur dan mengantisipasi kondisi pembangunan nasional

DR. Ir. Dicky Rezady Munaf, MS. MSCE, Alumnus KRA XXXII Lemhannas

DAFTAR PUSTAKA

1. Porter, M, "The Competitive Advantage of Nations", The Free Press, New York, 1990
2. Legge, JM, "Competitive Edge", Allen and Unwin, Australia, 1992.
3. Saaty, TL, "Analytical Hierarchy Process", Prentice Hall, New York, 1992.
4. Suryohadikusumo, S, "Perencanaan Ketahanan Nasional dalam Era Reformasi", Jurnal Ketahanan Nasional, No. IV (1), april 99, hal 1 -19.
5. Jacob, T, "Ketahanan Nasional dan Milenium Ketiga", Jurnal Ketahanan Nasional, No. IV (1), April 99, hal 211 - 30.
6. Sudarsono J, "Dimensions of Globalization", Bahan Diskusi Lemhanas, Juli 1998.
7. Wie, T.K, "Raising Indonesia's Competitive Ness", Prosiding Lokakarya Dewan Riset Nasional, Serpong, 1 1-1 4 Desember 1 996.
8., "Rural Asia: Beyond the Green Revolution", ADB Repat, 29 April 1999.
9. Pengestu, M, "Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia", CSIS, Jakarta 1997.
10. Abad, M.C, "Rowars an ASEAN Common Foreign and Security Policy", The Indonesian Quarterly, CSIS, Volume XXXVII No. 1, hal 2 - 8.
11. Paribrata, M.K.R, "Preparing ASEAN for the Twenty First Century", The Indonesian Quarterly, CSIS, Volume XXVI No. 3 hal 158 -163.
12. Hernandez, CG, "Towards Re-Examining the Non-Intervention Principle in ASEAN Political Cooperation", The Indonesian Quarterly, CSIS, Volume XXXVI No. 3 hal 164 -169.
13. Bandoro, "The Implecation of Economic Turbelence: ASEAN an the Brink at Depression and Disintegration", The Indonesian Quarterly, CSIS, volume XXVI No. 4 hal 298 - 300.
14. Hashim, DY, "ASEAN Cohesion: Issues and Responses", The Indonesian Quarterly, CSIS, Volume XXVI No. 4 hal 316 - 324.
15. Habib H, "Kapituselekta Hubungan Internasional", CSIS, Jakarta 1997.
16., "New Directions in the International Relations of South East Asia", Economic Relations, Institute of South East Studies, Singapura, 1973.
17., "AFTA - CER". Direktorat Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN, Deplu RI, 1998.
18. Tanjung, F, "Prospect for Regional Security and Defence Cooperations in the Asia Pasific Regions", 1997.
19. Amirin, Tatang M., 1989, "Pokok-pokok Teori Sitem", Penerbit Rajawali, 96
20. Hardjosoedarmo, Soewarso RADM, 1991, "Asean dan Tantangan Keamanannya di Tahun Sembilan Puluhan", Telstra, Maret - April
21. Nagel, E., 1979, "The Structure of Science, Problems in the Logic of Scientific Explanation", London & Henley, Routledge & Kegan Paul, 617
22. Ravianto, J., 1987, "Alih Teknologi Intranasional", PT Binawan Tehnik Aksara.
23. Siswomiharjo, Koento, W., 1990, "Filsafat Positivisme, Pengaruh dan Implikasinya Dewasa Ini", Bahan Kuliah, KRA XXIV
24. Sumarwoto, O., 1991, "Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global", PT. Gramedia Pustaka Utama, 322-hal.
25. Sunardi, R.M., 1987, "Pemahaman Ketahanan Nasional denaan Pendekatan Keluaran". Taskap KRA XX, 104 hal.
26. Taroepratjeka, H., 1989, "Pengembangan Sumber Daya.Manusia Untuk Meningkatkan Kemampuan IPTEK yang Memperkokoh Ketahanan Nasfial", Taskap KRA XXII, 99 hal.
27. The Technology Atlas Tema, 1987, "Technological Cabilities Assesment in Developing Countries", Special Issue of Technological Forecasting Social Change, Vol. 32 No. 1 August, 118 hal.
28. Munaf, D.R., 1999, "Konsepsi dan Tolok Ukur Ketahanan Regional Dalam Mengantisipasi Akselerasi Dinamika Paradigma Global", Taskap KRA XXXII, November 1999.

